



MUSEUM SUMPAH PEMUDA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CERITA
BERGAMBAR

Mr. Sartono

SANG PEJUANG DEMOKRASI



Cerita Bergambar

Mr. Sartono - Sang Pejuang Demokrasi

© Museum Sumpah Pemuda - 2020

Naskah

Sri Sadono Wiyadi

Dwi Nurdadi

Eko Septian Saputra

Ilustrasi

Studio Kotak Arang

Penyunting

Dwi Lestari

Penanggung Jawab

Titik Umi Kurniawati

Diterbitkan oleh:

Museum Sumpah Pemuda

ISBN 978-623-92337-2-3

Mr. Sartono

Sang Pejuang Demokrasi

Indonesia pernah memiliki putra terbaiknya. Seorang bangsawan Pura Mangkunegaran, bernama Sartono. Lahir dari keluarga ningrat, Sartono justru melepas gelarnya dan memilih bersikap seperti rakyat biasa yang berjuang tulus hati untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia dan terwujudnya negara Indonesia yang demokratis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada tahun anggaran 2020 Museum Sumpah Pemuda telah menyusun dan menerbitkan buku cerita bergambar tokoh Mr. Sartono. Penerbitan buku cerita bergambar tokoh Sumpah Pemuda bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat juang yang dapat diambil dari perjalanan hidup Mr. Sartono yang dikisahkan dalam cerita bergambar ini.

Raden Mas Sartono atau juga dikenal dengan nama Mr. Sartono adalah tokoh Sumpah Pemuda yang memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai seorang ketua DPR dan Mantan Pejabat Presiden, Mr. Sartono hidup dengan kesederhanaan dan penuh keteguhan hati. Sosok Mr. Sartono bisa menjadi contoh tepat bagi generasi muda yang butuh panutan konkret pemimpin bangsa yang berintegritas. Dalam cerita bergambar ini akan diceritakan perjalanan hidup Mr. Sartono dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa akhir hayatnya.

Semoga dengan adanya penerbitan buku cerita bergambar tokoh Mr. Sartono ini kebutuhan informasi masyarakat tentang sejarah tokoh dapat terpenuhi guna menambah khasanah dan referensi mengenai tokoh-tokoh pendiri bangsa.

Jakarta, September 2020
Kepala Museum Sumpah Pemuda,

Titik Umi Kurniawati
NIP 197009151997032001



Pura Mangkunegaran yang didirikan pada 17 Maret 1757 merupakan bagian dari Karesidenan Surakarta. Perjanjian Salatiga pada 1757 telah membagi tanah Kesultanan Mataram menjadi tiga kekuasaan. Salah satunya ialah Pura Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Said atau juga dikenal dengan Mangkunegoro I.

Senja di Desa Baturetno, Wonogiri, Raden Mas Martodikarjo, seorang cicit dari Mangkunegoro II, sedang amat berbahagia bersama sang istri, Raden Ayu Darmini. Baru saja lahir anak kedua yang mereka beri nama Sartono pada 5 Agustus 1900. Menurut bahasa Jawa, Sartono berarti 'keberadaannya menjadi pelengkap'. Kelak Sartono menjadi pelengkap dari kekurangan masyarakat dan bangsanya.

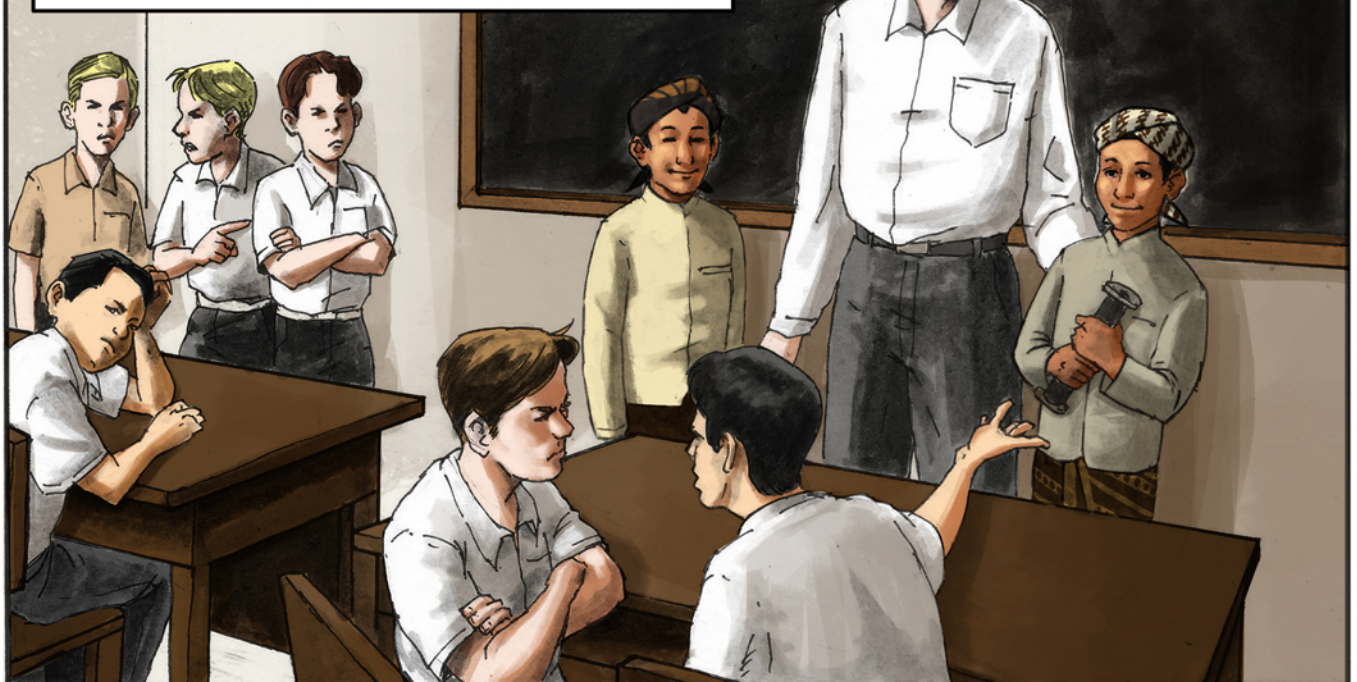


Ketika Sartono lahir, Desa Baturetno, Wonogiri merupakan daerah yang tandus. Budidaya sawah yang jarang, membuat masyarakat yang mayoritas petani mengkonsumsi palawija, ketela, singkong, dan gaplek.

Kendati demikian, sebagai keturunan bangsawan, Sartono mendapat pendidikan yang layak. Mula-mula ia bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) pada 1906 di Solo. Sekolah ini merupakan sekolah dasar untuk bangsawan, anak-anak Belanda, Tionghoa, dan keturunan Eropa lainnya. Di sini Sartono mendapatkan pendidikan disiplin ala barat dan pendidikan bahasa Belanda.



Sartono menunjukkan intelektual kecerdasan yang mumpuni sehingga ia meraih predikat pertama di sekolahnya. Akan tetapi, Sartono justru memilih pindah sekolah ke Holland Indische School (HIS) karena dirinya sebagai minoritas di ELS acap diganggu akibat timbulnya iri hati para pelajar Belanda dan keturunan Eropa.





Lulus dari HIS pada 1913 dengan meraih nilai terbaik, Sartono melanjutkan sekolah menengah di Meer Uitgebreid Lagera Onderwijs (MULO). Kembali Sartono menunjukkan kecerdasannya sehingga dikagumi oleh guru dan teman-teman sebagai anak yang pintar dan mudah bergaul. Sartono pun lulus MULO pada 1916.



Mendengar berdirinya sekolah hukum di Batavia, Sartono sangat tertarik dan ingin masuk sekolah itu. Ayah dan ibu Sartono juga mendukung dan bangga jika anaknya bisa menjadi hakim atau pengacara yang sangat jarang ditekuni oleh pemuda bumiputra.



Meski berat hati harus berpisah, sang ibu merestui Sartono untuk bersekolah di Batavia. Bersama sang Ayah, Sartono berangkat menggunakan kereta api melewati Bandung hingga akhirnya sampai di Batavia.

Rechtschool adalah sekolah hukum pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 26 Juli 1909. Letaknya berada di Koningsplein Zuid 10 (sekarang adalah Jalan Medan Merdeka Selatan). Di sini setiap siswa akan tinggal di Asrama dengan disiplin tingkat tinggi dan diajarkan budaya Eropa.



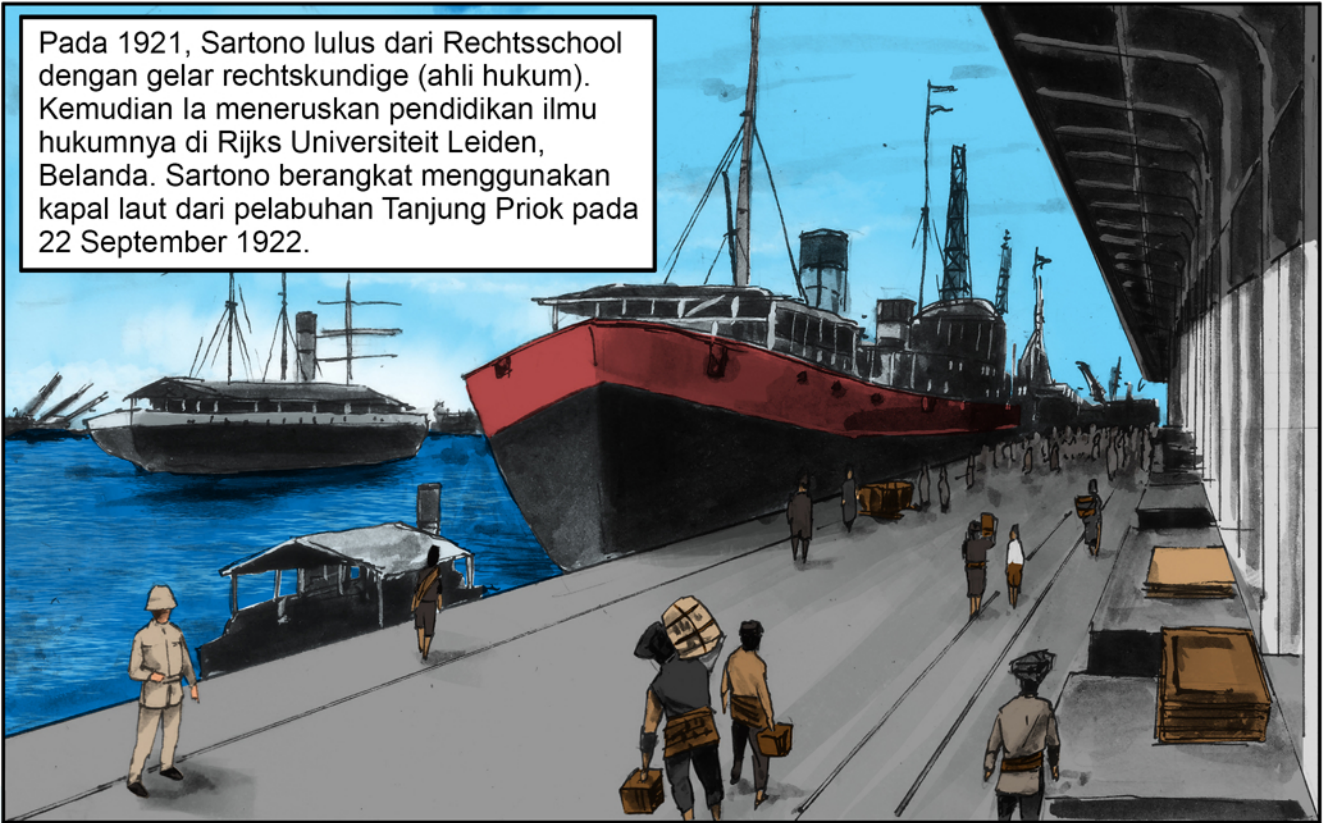
Sartono menimba ilmu hukum di Rechtsschool Batavia dengan tekun dan giat. Ia bergaul dengan pemuda dari beragam suku bangsa. Di sini pula Sartono berkenalan dengan Iwa Kusumasumantri.



Selama di Rechtsschool, Sartono memahami arti penjajahan yang sesungguhnya. Begitu buruk sistem tata negara Hindia Belanda yang tidak adil pada rakyat bumiputra. Bagi Sartono, sistem kolonial terbilang menindas dan sistem peradilan terbilang rasial.



Pada 1921, Sartono lulus dari Rechtsschool dengan gelar rechtskundige (ahli hukum). Kemudian ia meneruskan pendidikan ilmu hukumnya di Rijks Universiteit Leiden, Belanda. Sartono berangkat menggunakan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Priok pada 22 September 1922.



Di Negeri Belanda, Sartono banyak berkenalan dengan pelajar dari Hindia Belanda lainnya. Ia bersahabat dengan Mohammad Hatta, Iwa Kusumasumantri, Arnold Manonutu, Sukiman Wirjosandjojo, dan Budiarto. Jauh dari tanah air membuat mahasiswa Indonesia di Belanda memiliki solidaritas yang kental. Mereka tidak lagi memandang suku, agama, ataupun ras dalam bergaul. Rasa senasib dan setanah air diterjemahkan dalam perjuangan politik dan organisasi Perhimpunan Indonesia (PI).



Perhimpunan Indonesia dikenal sebagai organisasi yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Negeri Belanda. Bahkan pada 1925, PI mencetuskan Manifesto Perhimpunan Indonesia 1925. Secara garis besar manifesto ini berisikan perlunya kesatuan nasional, yakni dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit. Tanpa persatuan yang kokoh perjuangan akan sulit dicapai.



Pada 1926, Sartono lulus dan resmi mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr). Kemudian ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangan dengan mendirikan kantor advokat di Bandung bersama Iskaq Tjokrohadisurjo dan Soenario.



Sebagai advokat, Sartono berani membela kaum lemah dan tertindas. Ia pernah membela direktur surat kabar Keng Po, Hauw Tek Kong, yang dituduh menghasut rakyat agar bersatu melawan Belanda. Menurut Sartono di hadapan hakim pengadilan kolonial, seruan bersatu tidaklah bisa disamakan dengan hasutan.



Seiring berjalannya waktu, Sartono berjumpa dengan Soekarno di Bandung. Saat itu, Soekarno sudah menikah dengan Inggit Garnasih, seorang perempuan yang mempunyai andil dan sumbangsih besar terhadap perjuangan Soekarno.

Semenjak pertemuan tersebut, Sartono kerap berkumpul dan berdiskusi mengenai bangsa dengan Soekarno, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Iskaq Tjokrohadisurjo, Budiarto Martoatmojo, Sunario, dan Samsi Sastrowidagdo. Tak lama kemudian mereka sepakat membentuk organisasi belajar 'Algemeene Studieclub'.



Selanjutnya, karena antusiasme dan nasionalisme yang begitu luar biasa menentang pemerintah kolonial, para anggota Algemeene Studieclub mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia.



Nama Sartono kian melejit di panggung pergerakan nasional saat Kongres Pertama PNI di Surabaya yang berlangsung pada 28-30 Mei 1928. Sartono berpidato dengan tenang menguraikan pandangannya tentang wujud Indonesia Merdeka.



Sartono juga berperan di balik terbitnya Surat Kabar Persatoean Indonesia. Surat kabar ini merupakan corong pers PNI yang berfungsi untuk mendidik pengetahuan politik para anggota PNI dan mencetak kader-kader partai yang cerdas.



Sartono bersama PNI gencar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ialah PNI menyerukan persatuan seluruh organisasi pergerakan nasional yang kemudian terhimpun dalam organisasi Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).



Pada Kongres Pemuda Kedua tanggal 27-28 Oktober 1928 di gedung Indonesische Clubgebouw, Sartono hadir mewakili Algemeene Studieclub. Saat itu seorang peserta menyampaikan pandangan umum tentang apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia merdeka. Mendengar kata merdeka, Polisi Kolonial sigap mengambil tindakan sehingga keributan kecil terjadi.



Polisi Kolonial menuntut agar kongres dibubarkan. Sugondo Djojopoespito sebagai pimpinan kongres, menolak tuntutan tersebut. Memerhatikan situasi tidak kondusif, Sartono yang notabene seorang sarjana hukum sekaligus advokat lulusan Leiden, tak tinggal diam. Ia menyampaikan dengan tegas kepada Polisi Kolonial bahwa menjadi merdeka tidak dapat dikenakan hukum pidana. Kongres yang nyaris bubar itu pun akhirnya dilanjutkan kembali.





Di tengah medan perjuangan, Sartono menikah dengan Siti Zaenab pada 26 Mei 1930 di Solo dan dikaruniai 3 orang anak yaitu R.M Gunadi, R.A Sri Mulyati, R. A Rukmini.



Aktivitas politik kader PNI yang gencar menebarkan semangat nasionalisme dan persatuan membuat Pemerintah Kolonial gerah. Alhasil para pemimpin PNI, seperti Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Soepriadinata ditangkap atas tudingan makar dan menghasut rakyat untuk melakukan kejahatan kepada Pemerintah Kolonial pada 29 Desember 1929.

Sartono lantas menjadi pengacara Soekarno saat pengadilan digelar di Landraad Bandung. Kendati argumen dan dasar hukum yang kuat telah dilontarkan oleh Sartono, pengadilan yang berat sebelah tanpa ampun menjebloskan Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Soepriadinata di penjara Sukamiskin, Bandung pada 22 Desember 1930.



Meski berat menerima keputusan itu, Sartono kemudian mengadakan Kongres Luar biasa PNI pada 16 April 1931 dan memutuskan pembubaran PNI karena muncul kekhawatiran Pemerintah Kolonial menyatakan PNI sebagai partai terlarang. Sebagai gantinya, Sartono mendirikan Partai Indonesia (Partindo) pada 29 April 1931 sebagai keberlanjutan medan perjuangan PNI dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.



Setelah bebas dan kembali dalam kancah perjuangan politik, Soekarno memilih bergabung bersama Sartono dalam Partindo, ketimbang PNI baru yang didirikan oleh Mohammad Hatta. Sampai pada pembuangan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir ke Boven Digul kemudian Pulau Banda, Soekarno sempat menjadi ketua Partindo hingga menjalani pembuangan ke Flores.



Ketika pemerintah kolonial Belanda diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang, Sartono menjadi salah satu anggota Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dikomandoi Empat Serangkai, Soekarno, Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hadjar Dewantara. PUTERA merupakan badan yang berfungsi memobilisasi kekuatan rakyat untuk kepentingan Jepang yang didirikan pada 16 April 1943.



Karena PUTERA lebih menguntungkan rakyat Indonesia, Jepang membubarkan badan ini pada 1 Maret 1944 dan menggantinya dengan Jawa Hookokai. Sartono turut menjadi anggota Jawa Hookokai. Sedikit berbeda dengan Putera, Jawa Hookokai berada langsung di bawah pengawasan pejabat pemerintah pendudukan Jepang.



Pada 5 September 1943, Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk sebuah badan yang bernama Tjoe Sangi In. Badan ini menyerupai parlemen seperti Volksraad pada masa penjajahan Belanda. Tjoe Sangi In berkewajiban menyampaikan nasihat atau usul kepada Pemerintah Pendudukan Jepang.



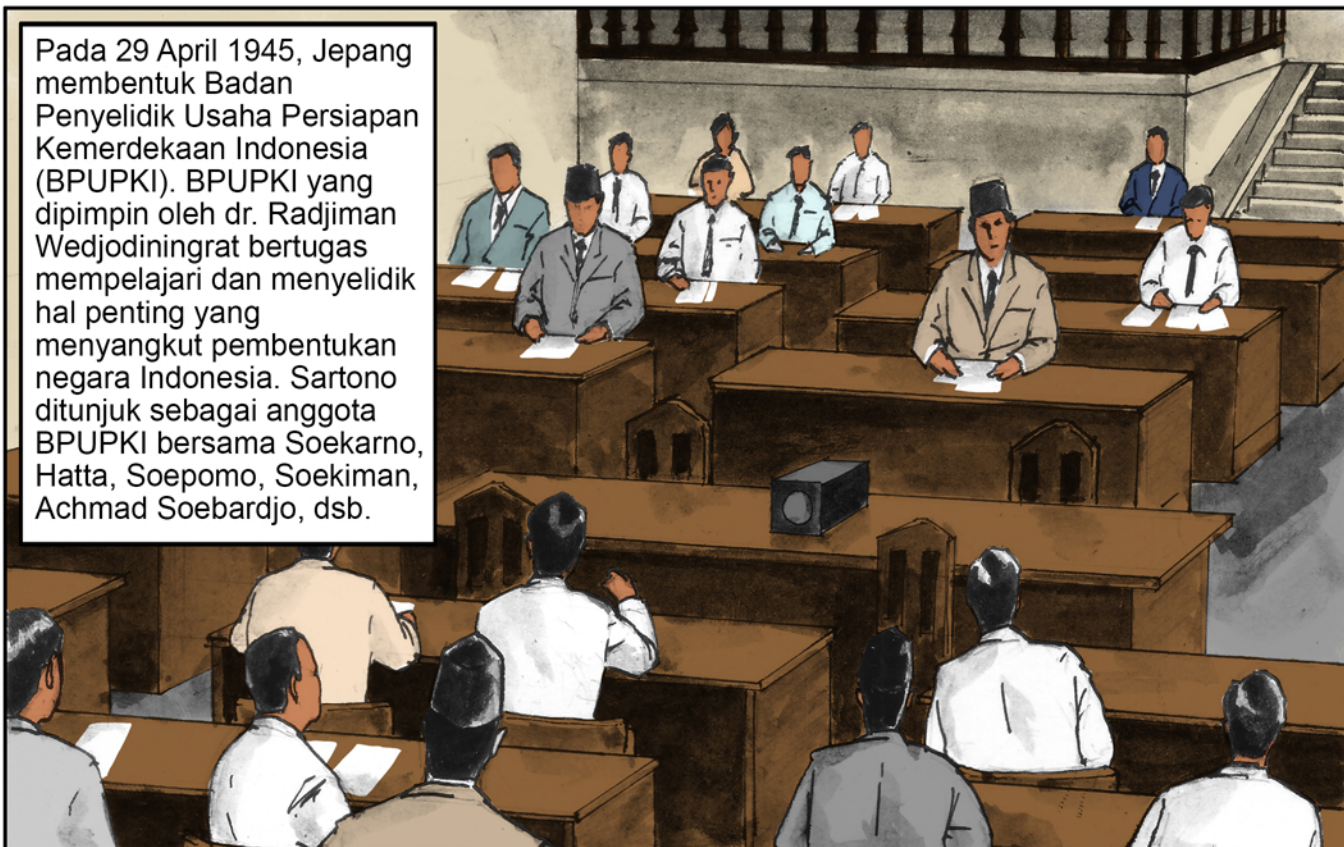
Sartono termasuk anggota Tjoe Sangi In. Ketika terjadi silang pendapat antara kalangan nasionalis dan Islam (Masyumi) menjelang kemerdekaan.



Sartono mengemukakan harapannya pada sidang Tjoe Sangi In yang terakhir agar kekuatan nasionalis dan Islam semakin padu demi memberi tekanan kuat kepada pemerintah pendudukan Jepang.



Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI yang dipimpin oleh dr. Radjiman Wedjodiningrat bertugas mempelajari dan menyelidik hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Sartono ditunjuk sebagai anggota BPUPKI bersama Soekarno, Hatta, Soepomo, Soekiman, Achmad Soebardjo, dsb.



Saat sesi sidang BPUPKI sedang membahas mengenai perlu atau tidaknya lembaga pembuat undang-undang atau badan perwakilan rakyat, Sartono menyanggah pendapat Supomo yang menyetujui anggapan bahwa badan perwakilan rakyat tidak diperlukan ketika keadaan perang. Bagi Sartono, rakyat harus diberi jaminan dalam anggaran dasar kendati tidak bisa dijalankan pada masa perang.



Pada 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur No. 56, Jakarta. Sartono ikut hadir menyaksikan peristiwa sakral tersebut.



Usai proklamasi, Pemerintahan Republik Indonesia berada di bawah komando Soekarno dan Hatta yang didaulat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 5 September 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet pertamanya. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara.

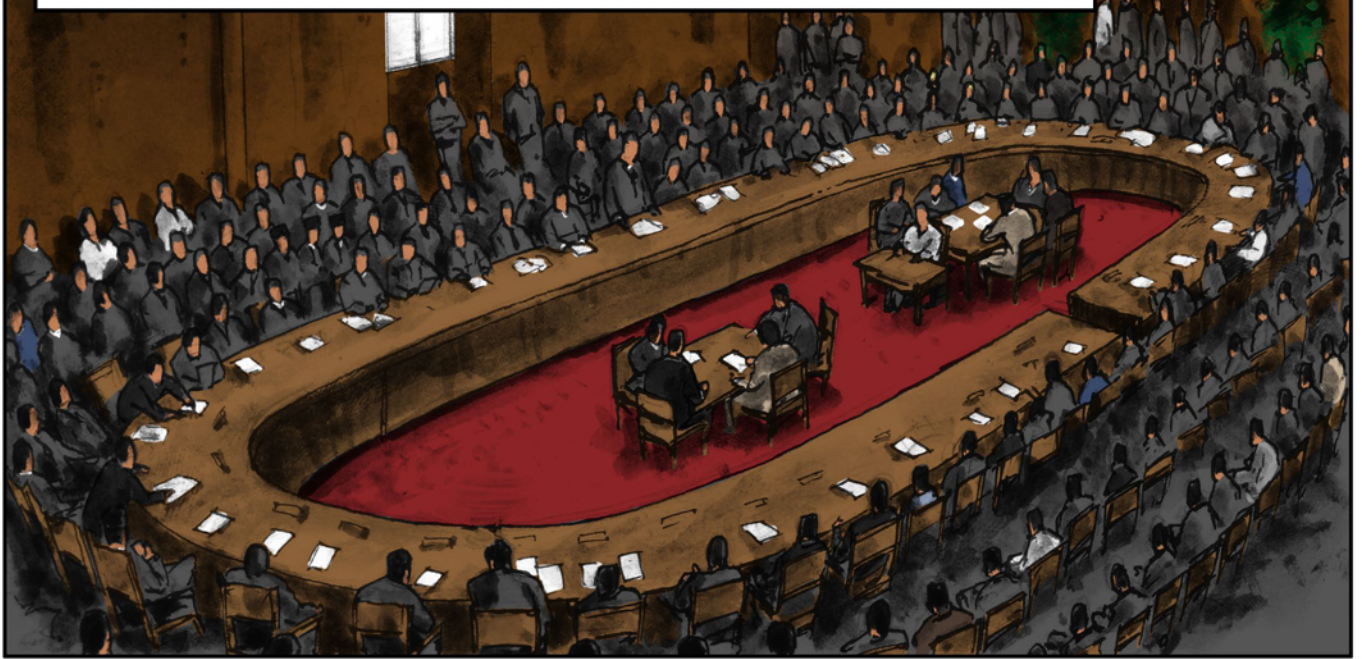
Akan tetapi, belum setahun, terbentuknya kabinet parlementer Syahrir pada 14 November 1945 mengakhiri jabatan Sartono sebagai Menteri Negara. Setahun kemudian bersama kawan-kawannya, seperti Sarmidi Mangoensarkoro, Soewirjo, dan Soediro, Sartono mendeklarasikan berdirinya kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 29 Februari 1946.



Sesudah PNI berdiri, Sartono diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). KNIP merupakan cikal bakal parlemen Indonesia yang pekerjaan hariannya dilakukan oleh badan pekerja. Sartono sebagai anggota BP-KNIP mewakili fraksi PNI.



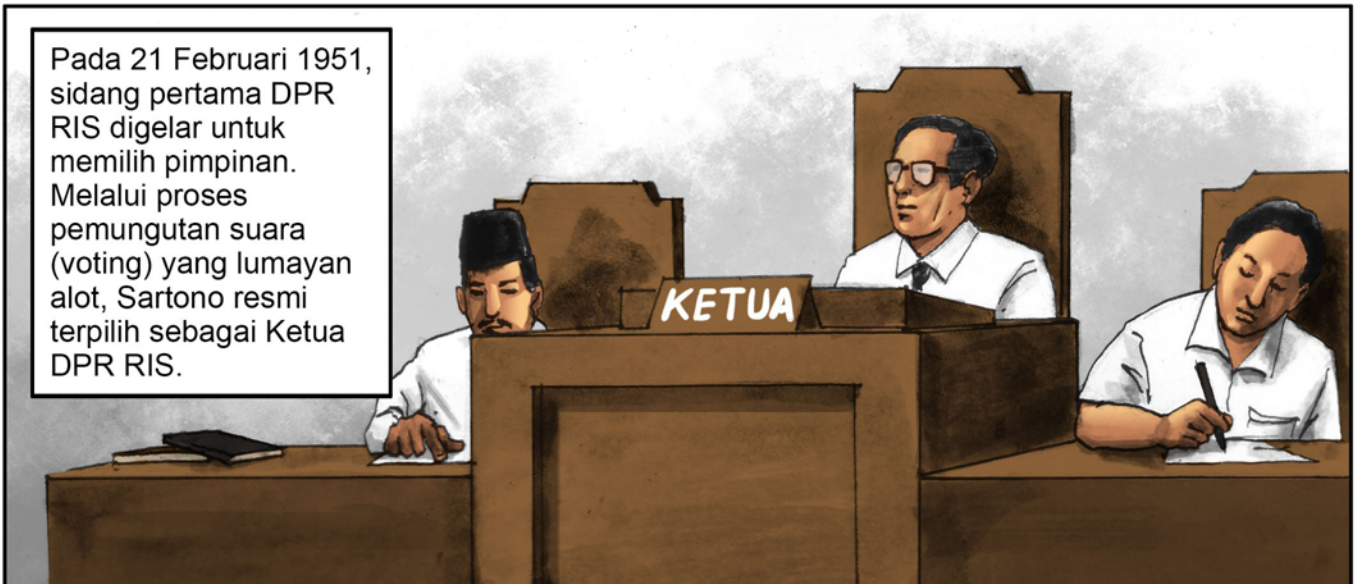
Sartono juga menjadi bagian penting dalam perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti mengawal perundingan Roem-Royen dan penasehat umum delegasi RI pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. KMB menandani pengakuan Kemerdekaan Indonesia secara *de jure* di dunia Internasional.



Salah satu kesepakatan KMB adalah berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Menyusul kemudian dibentuk parlemen serikat, Dewan Perwakilan Rakyat RIS (DPR RIS), yang berkantor di gedung Societeit Concordia.



Pada 21 Februari 1951, sidang pertama DPR RIS digelar untuk memilih pimpinan. Melalui proses pemungutan suara (voting) yang lumayan alot, Sartono resmi terpilih sebagai Ketua DPR RIS.



Jabatan Ketua DPR pun kembali diemban Sartono saat Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan. Bahkan, setelah pemilihan umum pertama (Pemilu 1955), Sartono yang terpilih secara demokratis sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah, kembali didapuk menjadi Ketua DPR melalui proses pemungutan suara (voting).



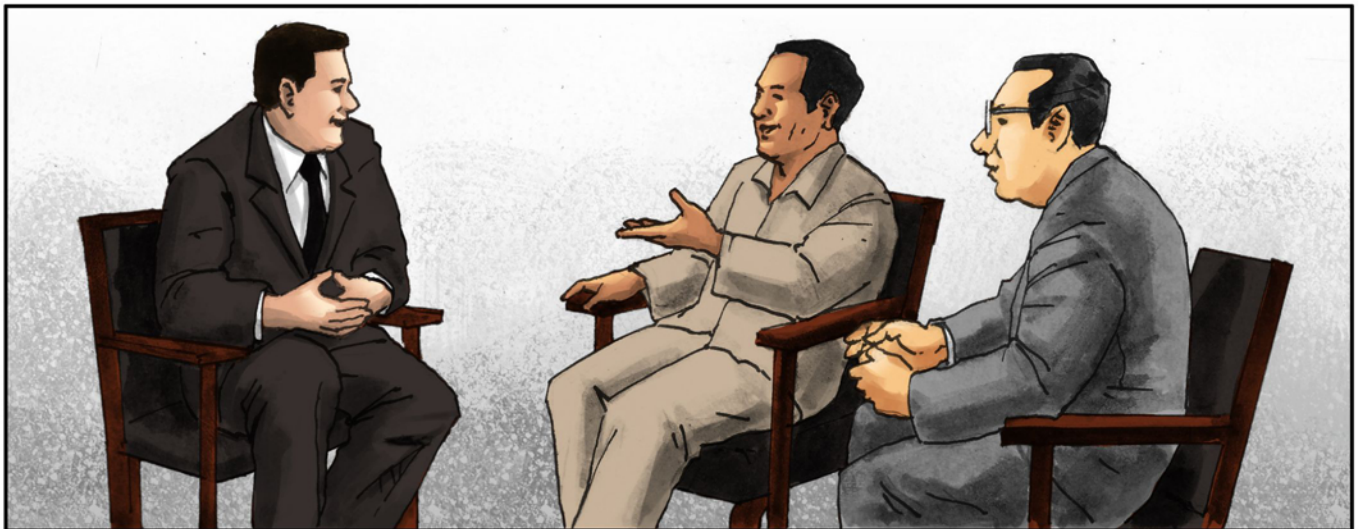
Selama menjadi ketua DPR, Mr Sartono selalu menerapkan hidup sederhana, tidak memperkaya diri, dan konsisten menjaga demokrasi. Selain itu, Sartono tidak pernah sekalipun menyandingkan gelar kebangsawanannya.



Sebagai Ketua DPR, Sartono termasuk mau mendengarkan pendapat banyak pihak dan tidak menutup diri. Ketika terjadi demonstrasi di depan Gedung DPR, Sartono pun menemui massa demonstran dan menampung aspirasi mereka.



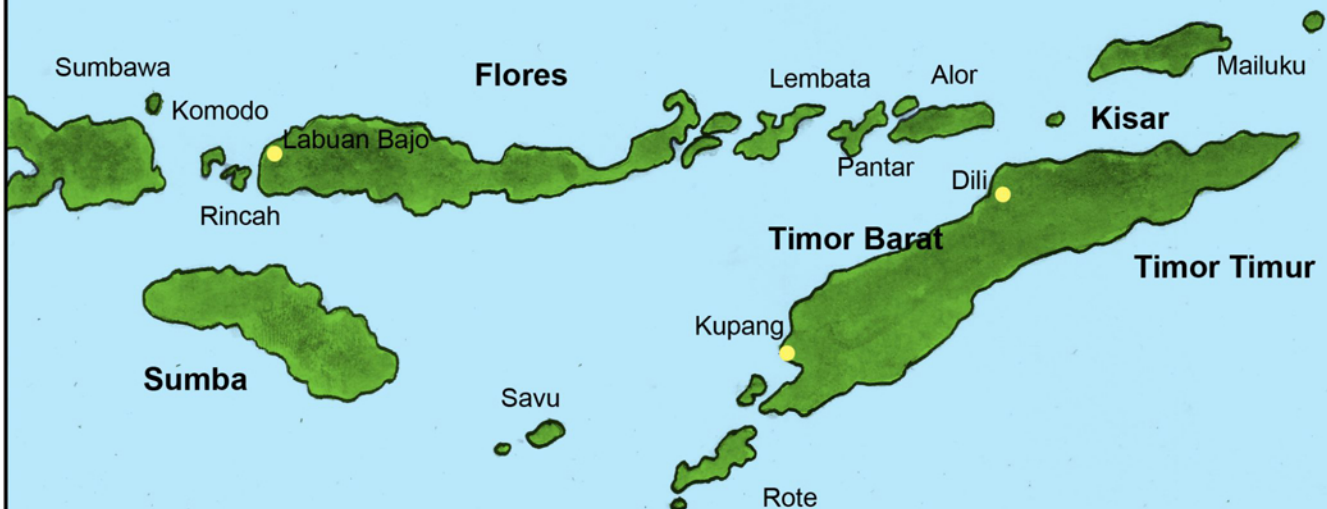
Tak hanya Presiden Soekarno, Sartono juga aktif dalam pergaulan internasional sebagai Ketua DPR. Ia kerap bertemu dan berdiskusi dengan banyak pemimpin dan perwakilan negara sahabat.



Sartono juga pernah menjadi Pejabat Presiden yang dilantik pada 20 Desember 1957. Hal itu disebabkan mundurnya Mohammad Hatta pada 1956 sehingga menyisakan kekosongan kursi kepemimpinan apabila Presiden Soekarno berhalangan hadir.



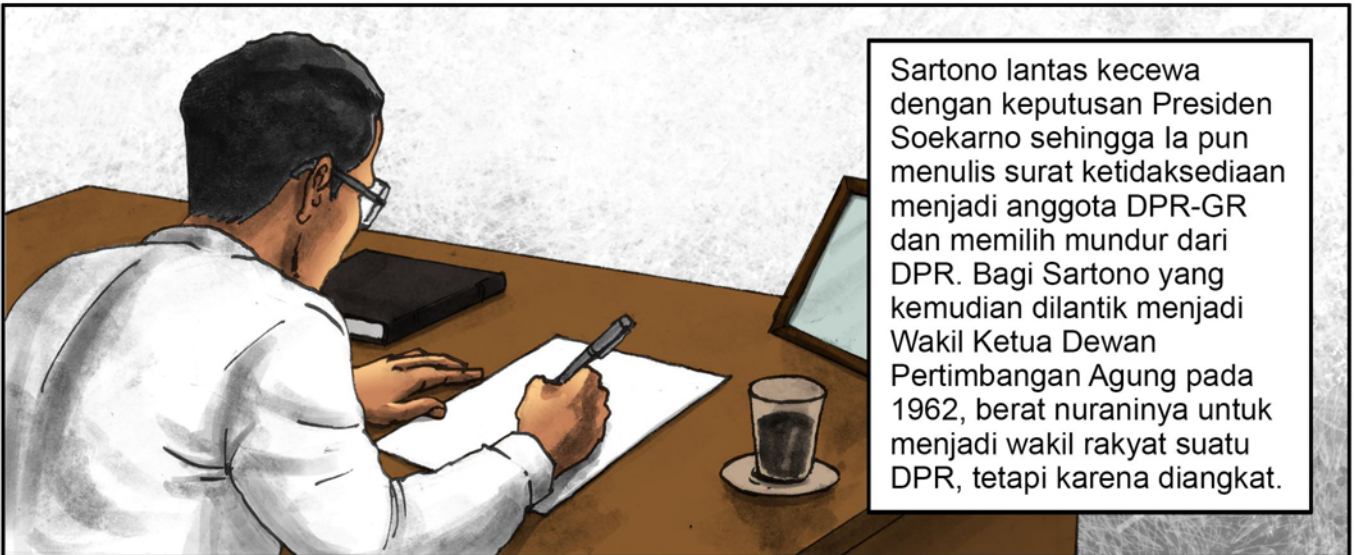
Salah satu jasa besar Sartono semasa menjadi Pejabat Presiden adalah Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Perubahan Nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara.



Pada awal masa Demokrasi Terpimpin, tepatnya 5 Maret 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena dianggap sudah tidak sejalan dengan pikiran pemerintah. Sebagai gantinya, Presiden melantik para anggota DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang ditunjuknya mewakili berbagai kalangan pada 24 Juni 1960.



Sartono lantas kecewa dengan keputusan Presiden Soekarno sehingga ia pun menulis surat ketidaksediaan menjadi anggota DPR-GR dan memilih mundur dari DPR. Bagi Sartono yang kemudian dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada 1962, berat nuraninya untuk menjadi wakil rakyat suatu DPR, tetapi karena diangkat.



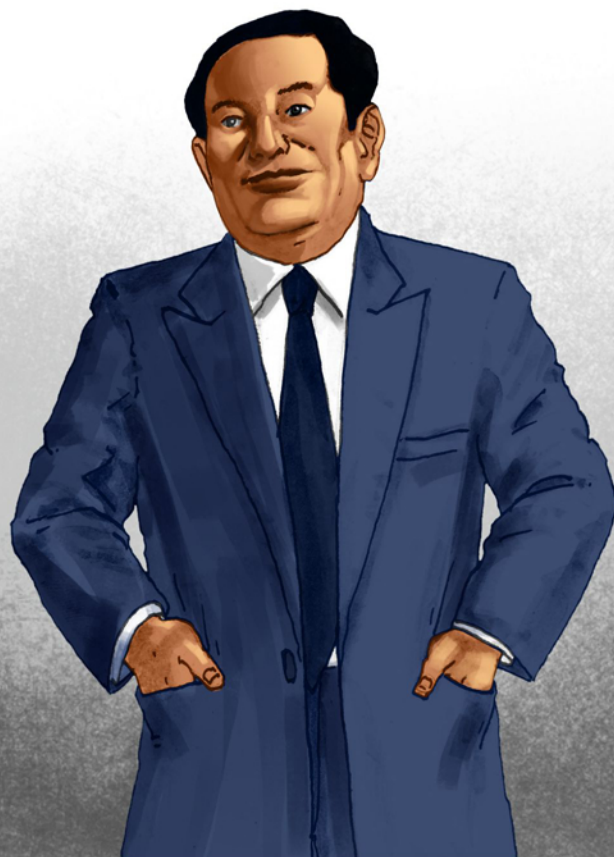
Saat menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1962, Sartono tak lupa akan perjuangan menegakkan demokrasi. Melalui DPA, Sartono mengusulkan mencabut Undang Undang Darurat dan memperluas hak-hak demokrasi rakyat.



Sartono meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1968 setelah menjalani operasi penyakit prostat yang dideritanya. Sartono dimakamkan di Makam Kerabat Mangkunegaran "Astana Bibis Luhur", Solo, Jawa Tengah.



Sikap dan prinsip hidup Sartono menjadi teladan bagi generasi muda. Gaya hidup Sartono yang bersahaja dan keteguhannya menjaga demokrasi menjadi panutan. Ia tak silau akan jabatan dan segala kebanggaan gelar dan materi. Oleh karena itu, sangat pantas baginya mendapat julukan Bapak Demokrasi Indonesia.



Mr. Sartono

SANG PEJUANG DEMOKRASI

Indonesia pernah memiliki putra terbaiknya. Seorang bangsawan Pura Mangkunegaran, bernama Sartono.

Lahir pada 5 Agustus 1900 di Desa Baturetno, Wonogiri, yang merupakan cicit dari Mangkunegoro II. Menurut bahasa Jawa, Sartono berarti 'keberadaannya menjadi pelengkap'. Kelak Sartono menjadi pelengkap dari kekurangan masyarakat dan bangsanya.

Sikap dan prinsip hidup Sartono patut menjadi teladan bagi generasi muda. Gaya hidup Sartono yang bersahaja dan keteguhannya menjaga demokrasi menjadi panutan. Ia tak silau akan jabatan dan segala kebanggaan gelar dan materi, oleh karena itu sangat pantas baginya mendapat julukan Bapak Demokrasi Indonesia.

MUSEUM SUMPAH PEMUDA

Jl. Kramat Raya No. 106 Jakarta Pusat 10420

Telp. (021) 315 4546

E-mail : museumsumpahpemuda@kemdikbud.go.id

Laman : www.museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id

 Museum Sumpah Pemuda

 @m_sumpahpemuda

 @museumsumpahpemuda

 Muspada

ISBN 978-623-92337-2-3



9 786239 233723

